Buletin Dakwah
Al Jabhah
Benteng Sunni Asy'ari Syafi'i

WASPADA! KEBANGKITAN NEO PKI (Bagian 2)

PKI PASCA REFORMASI

Pasca Reformasi 1998, Neo PKI dan simpatisan mulai bergerak memutarbalikan fakta sejarah dan posisikan diri sebagai korban kekejaman Orde Baru, hingga pengakuannya sebagai pahlawan Kemerdekaan RI. Dalam fase ini, perlahan tapi pasti, Kebangkitan Neo PKI mulai tercium. Jika diamati dengan seksama, akan ditemukan banyak indikator penunjang kebangkitan PKI. Berikut ini kami paparkan sebagian indikasi kuat yang muncul sebagai penunjang dugaan kebangkitan PKI;

INDIKASI KEBANGKITAN PKI

1. TUNTUTAN PENCABUTAN TAP MPRS No. XXV Th. 1966

Awal Reformasi 1998, gerakan mahasiswa kiri seperti; Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan lainnya, dengan lantang suarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No. XXV Th. 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Neo PKI ingin hancurkan senjata utama RI yang menjerat PKI di Orde Baru, yaitu TAP MPRS No. XXV Th. 1966. Ini adalah INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

2. PENGHAPUSAN SEJARAH PKI DENGAN HENTIKAN TAYANGAN G30S/PKI DAN HILANG DARI KURIKULUM

Orde baru selalu berikan informasi lengkap tentang PKI. Setiap 30 September TVRI selalu putarkan film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduksi 1984. Sehingga informasi PKI tergambar mudah oleh semua kalangan, dan bangsa selalu waspada akan PKI. Namun pasca Reformasi, pemutaran film itu diberhentikan atas permintaan mantan Staf TNI AU; Marsekal Saleh Basarah dengan dalih terlalu menyudutkan TNI AU. Jika demikian, itu sangat disesalkan. Cukup dengan membuang bagian yang dianggap fitnah saja, bukan seluruhnya. Karena banyak hal lain yang bisa dijadikan pelajaran bangsa agar waspada akan PKI. Sebenarnya, fakta menunjukan bahwa G30S/PKI juga libatkan semua angkatan; TNI AD, AU, AL, POLRI bahkan Pasus Pelindung Presiden RI; Cakrabirawa. Maka kenapa harus ditutupi? Justru ini pelajaran bagi mereka agar lebih waspada dan hati-hati menjaga kesatuan dari infiltrasi PKI.

Selain film, informasi juga diberikan melalui kurikulum pendidikan dengan pencantuman Sejarah Pengkhianatan PKI; baik Pemberontakan PKI Th. 1948 atau Tragedi G30S/PKI. Sehingga sikap Anti PKI terlembagakan dengan baik. Namun pasca Reformasi, hal ini hilang dari kurikulum. Sehingga generasi muda kini terjebak dalam Propaganda Pemutihan PKI. Dan ini juga termasuk INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

3. PENGHAPUSAN "LITUS" BAGI CALON PEJABAT

Dulu seluruh bakal calon pejabat wajib ikuti LITSUS, yaitu penelitian khusus secara ketat dan cermat serta teliti dan mendalam terhadap setiap calon pejabat untuk pastikan bebas dari PKI. Maka dari itu, kader muda PKI sangat sulit sekali duduki kursi pemerintahan. Namun kini LITSUS dihapus dengan alasan HAM. Ini adalah gerbang baru untuk berkuasa sebarkan paham komunisme. Jelas, ini termasuk INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

4. PUTRA PUTRI PKI MASUK PARPOL DAN INSTANSI NEGARA

Penghapusan LITSUS merupakan kesempatan emas bagi keturunan PKI untuk duduki kursi pemerintahan. Tentu boleh dan tidak dilarang, karena hak POLEKSOSBUD

kemungkinan agenda tersebut dialihkan pada kesempatan lain. RUU KKR yang pernah ditolak, kini malah diajukan kembali dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk daftar Prolegnas DPR 2015. Semakin kuat peningkatan wacana jadi rencana, sehingga ini merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

IMPLIKASI MINTA MAAF

Jika Presiden RI meminta maaf pada PKI secara resmi, maka ada sederet impikasi hukum maupun politik yang tidak bisa dihindari, antara lain:

1. REHABILITASI NAMA PKI SERTA PEMUTIHAN STATUS HUKUM PKI MENJADI PIHAK YANG BENAR

Ini berarti, label PENGKHIANAT yang selama ini disematkan pada PKI harus dihapuskan dan PKI menjadi bersih dan boleh tembus menjadi partai.

2. KEMBALINYA SELURUH ASET PKI DAN KOMPENSASI GANTI RUGI KEPADA KELUARGA BESAR PKI

Seluruh aset dan kekayaan PKI yang pernah disita, termasuk tanah maupun gedung, wajib dikembalikan kepada PKI. Juga seluruh kerugian yang ditanggung PKI, baik anggota PKI yang dibunuh, dianiaya, ditahan, maka negara wajib ganti rugi. Konon, Keluarga Besar PKI tuntut ganti rugi minimal Rp. 1 Milyar per-orang.

Jika merujuk pada laporan Deplu AS Th. 1960; anggota PKI Th. 1960 mencapai 2 juta orang, dan diperkirakan Th. 1965 mencapai 3 juta orang. Maka nilai ganti rugi yang harus dikeluarkan negara mencapai (Rp. 1 Milyar X 3 Juta orang) = Rp. 3.000.000.000.000.000,- (Rp. 3 Ribu Trilyun). Jumlah yang fantastis dan sangat lebih dari cukup untuk lahirkan PKI kembali, bahkan untuk menangkan pemilu sekalipun.

3. PKI TUNTUT PERADILAN HAM ATAS PENGANIAYAAN DAN BENTUK KRIMINALISASI TNI, NU DAN ORMAS ISLAM LAINNYA

Ini berarti semua lawan PKI termasuk Ulama dan Umaro, khususnya TNI dan NU yang ikut dalam pembersihan PKI 1965 akan diajukan ke Pengadilan HAM Nasional maupun Internasional serta dinyatakan bersalah secara hukum juga dicap sebagai PENJAHAT PERANG yang telah lakukan pelanggaran HAM berat. Hal semacam ini juga termasuk bentuk kriminalisasi sebagai anggota maupun institusi TNI dan NU serta Ormas Islam lainnya yang akan membuka luka lama sekaligus menghidupkan fitnah yang telah lama padam.

4. PENJAHAT JADI PAHLAWAN, DAN SEBALIKNYA; PAHLAWAN JADI PENJAHAT

Jika pejuang dan pembela NKRI Penumpas PKI dinyatakan sebagai PENJAHAT PERANG, maka ini berarti pahlawan dijadikan penjahat dan pecundang, sedangkan PKI yang jahat dan pengkhianat dijadikan pahlawan.

5. MENCIPTAKAN KEMBALI KONFLIK HORISONTAL ANTARA ISLAM DAN PKI

Umat Islam tidak akan tinggal diam jika ulama dan pahlawannya dikriminalisasi dan diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang, sehingga mendorong umat Islam bangkit memerangi dan menumpas kembali PKI, bahkan lebih dahsyat dari peristiwa 1965.

FITNAH MINTA MAAF

Minta maaf atas dosa dan kesalahan merupakan perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan. Namun, jika meminta bukan pada tempatnya, apalagi menimbulkan fitnah besar dan mengantarkan pada konflik berdarah, maka hukumnya adalah HARAM. Ajaran agama apa, hukum negara mana, serta logika berpikir siapa yang benarkan seorang korban pembunuhan sadis meminta maaf kepada pembunuhnya, dan seorang wanita korban pemerkosaan brutal meminta maaf kepada bajingan pemerkosanya, serta korban pembantaian biadab meminta maaf pada gerombolan teroris pembantainya??!

Karenanya, disini kami nyatakan bahwa Presiden RI **HARAM** meminta maaf kepada PKI dan tidak boleh ada SEJENGKAL PUN tempat di atas bumi NKRI untuk PKI !!!

tim redaksi

TIM REDAKSI // Pelindung : Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc, MA .**Penasehat :** 1. KH. Misbahul Anam . 2. KH. Ahmad Sobri Lubis. **Pimp.Redaksi :** Habib Muhammad Hanif Al Attas. **Sekretaris & Sirkulasi :** Ust. Mochammad Ramdan Samadi. **Designer :** M. Sholahuddin Hakim. **Layouter :** M. Ilyas Ihkam. **Penerbit :** DPP LIF (Lembaga Informasi Front). **SEKRETARIAT:** Jl. Petamburan III No.17 Tanah Abang - JAKPUS . Telp /WA : 082316076430 **Email :** buletin.aljabhah@gmail.com **Fanspage :** Buletin Aljabhah .**Twitter :** @buletinaljabhah .- Download versi Digitalnya di al-jabhah.blogspot.com
KRITIK DAN SARAN HANYA MENERIMA VIA SMS

(Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) mereka sudah semestinya diakui dan diberikan. Tapi mereka harus tahu diri untuk tidak salah gunakan kesempatan sebarkan paham komunisme orang tua mereka dengan pemutarbalikan fakta sejarah dan memanipulasi data seolah Ulama dan Umaro, khususnya NU dan TNI adalah pelaku kejahatannya. Lihat saja, Ribka Tjiptaning, salah satu ketua komisi DPR RI lewat PDIP, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang berjudul; "Aku Bangga Jadi Anak PKI" dan "Anak PKI Masuk Parlemen". Dan hal semacam ini juga termasuk INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

5. PEMBUATAN BUKU DAN FILM PEMBELAAN TERHADAP PKI

Reformasi 1998 juga menjadi gerbang kebebasan pers secara bablas. Banyak penerbitan dan peredaran buku Pro PKI, seperti: Aku Bangga Jadi Anak PKI, dan Anak PKI Masuk Parlemen (Karya Ribka Tjiptaning), Gerwani (Karya Amurwani Dwi Lestariningsih), Kabut G30S/PKI (Karya Mohammad Achadi), Palu Arit di Ladang Tebu (Karya Hermawan Sulistyo), Penghancuran Gerakan Perempuan (Karya Saskia Eleonora Wieringa), Siapa Sebenarnya Soeharto (Karya Eros Djarot, dkk.), Terempas Gelombang Pasang (Karya Sudjinah). Juga munculnya film-film Pro PKI seperti; Jagat, dan Senyap, Sang Penari, Gie, Jembatan Bacem.

Inti dari buku dan film tersebut adalah menumbuhkan simpatik bangsa terhadap PKI, menempatkan PKI sebagai korban bahkan pahlawan. Tidak ada satu pun dari buku dan film tersebut yang ungkap kebiadaban PKI. Sangat jelas, ini adalah INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

6. RUU KKR (KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI)

Pasca Orde Baru, Narapidana PKI terus paksa pemerintah untuk sahkan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) melalui YPKP 65/66 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) yang selalu suarakan bahwa PKI merupakan korban Orde Baru. Tidak ragu, ini adalah INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

7. PEMBELAAN KOMNAS HAM DAN LSM LIBERAL UNTUK PKI

Pasca Reformasi 1998, Komnas HAMdan LSM Liberal merupakan kelompok terdepan yang desak dan tekan pemerintah untuk sahkan RUU KKR menjadi UU. Sehingga Th. 2004 pemerintah resmi ajukan RUU KKR ke DPR RI untuk dibahas, namun dimentahkan oleh DPR RI Th. 2006. Dan kini 2015, secara mengejutkan, pemerintah kembali ajukan RUU KKR agar masuk Prolegnas DPR RI. Apapun alasannya, ini adalah bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

8. KERJASAMA PARPOL INDONESIA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA

Di Orde Baru, tidak ada satu ormas/orsospol pun yang berani jalin hubungan dengan Partai Komunis China (PKC). Namun pasca Reformasi, NASDEM secara terbuka jalin kerja sama dengan PKC. (06/06/2015) Wapres PKC, Gou Yezhu temui Ketum Nasdem; Surya Paloh di kantor DPP Nasdem untuk bahas agenda diplomatik. Diberitakan merdeka.com, (14/10/2013) PDIP telah kirim 3 angkatan dari kadernya untuk studi banding ke PKC. Kader PDIP ini belajar bagaimana PKC berkerja. Fakta kerjasama ini wajib dicurigai sebagai INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

9. PEMBENTUKAN ORMAS/ORSOSPOL YANG BERAFILIASI KEPADA PKI

Th. 1994, Budiman Sudjatmiko dirikan PRD (Partai Rakyat Demokrasi) dengan manifesto politik yang berhaluan komunis, sehingga dilarang Orde Baru. Saat Reformasi 1998, PRD termasuk paling aktif lakukan anarkis. Dua program utama PRD dalam manifesto politiknya berhasil terwujud pasca Reformasi 1998, yaitu Referendum Timor Timur dan Pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan banyak ormas/orsospol milik keturunan PKI yang mulai berani tampil di publik, hanya saja mereka belum berani sebut dirinya PKI.

Selanjutnya, mantan aktivis PRD tersebar ke berbagai lini politik. Budiman Sudjatmiko dan Rahaya Waluya bergabung dengan PDIP. Anom Astika dan Ardi Putra bergabung dengan PERINDO. Andi Arif menjadi Staf Ahli Presiden. Dita Indah Sari bergabung dengan PBR dan menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Faisol Reza bergabung dengan PKB. Nezar Patria, mantan Sekjen SMID kini jadi Redaktur Pelaksana VIVAnews.com. Henry Kuok , menjadi pastor di Chicago AS. Tokoh kiri lainnya; Pius Lustrialanang, pendiri ALDERA dan ISAI, pernah bergabung dengan PAN, lalu PDIP, kini Gerindra. Adian Napitupulu, aktivis GMKI dan pendiri FORKOT, politisi PDIP, kini anggota DPR RI. Apakah hal semacam ini bukan termasuk INDIKASI KEBANGKITAN PKI?

10. USULAN PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA DALAM KTP

Di Jakarta, Si Kafir Ahok serukan agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Ini kabar gembira bagi Liberal dan kelompok haluan kiri. Namun hal ini ditolak oleh Mendagri RI; Gumawan Fauzi. Seruan Ahok ini wajib dicurigai sebagai trik licik PKI, jika kolom agama dihapus, maka PKI yang Anti Agama bisa bebas miliki KTP tanpa agama. Dan Ahok patut dicurigai sebagai bagian dari Gerakan Neo PKI, karena memang dulu China di Indonesia banyak terlibat dengan PKI. Pantas Ahok nekat larang Ibadah Qurban, membongkar masjid, usulkan apartemen pelacuran dan pulau judi, serta mencaci maki rakyat dan pejabat dengan bahasa kasar dan kotor, percis sifat dan sikap yang pernah dipertontonkan PKI dahulu. Ini juga bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

11. RENCANA GUS DUR DAN SBY MINTA MAAF KEPADA PKI SERTA WACANA YANG SAMA DARI JOKOWI

Wacana Permohonan Maaf Presiden kepada PKI atas nama negara pertama muncul zaman Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun tidak terealisasi karena gelombang penolakan sangat besar. Khususnya FPI kerahkan 10.000 laskar kepung Istana Presiden dalam aksi Anti PKI di Jakarta. Wacana itu kembali muncul zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan SBY sempat ajukan pembahasan RUU KKR di DPR RI, namun tetap gagal karena penolakan sangat keras. Wacana ini juga muncul kembali di zaman Jokowi. RUU KKR yang pernah ditolak dulu, kini pun diajukan kembali dengan sedikit modifikasi sehingga masuk daftar Prolegnas DPR RI Th. 2015. Hal ini patut dicurigai sebagai bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

12. JANJI KAMPANYE JOKOWI, JIKA MENANG AKAN MINTA MAAF KEPADA PKI

Santer berita, kini kelompok kiri dan LSM Liberal tagih janji Jokowi untuk meminta maaf kepada PKI. Konon informasinya Jokowi punya "kontrak politik" secara "diam-diam" untuk minta maaf pada PKI jika dia menang. Jika berita ini benar, tidak diragukan ini merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

13. JARGON JOKOWI TENTANG REVOLUSI MENTAL

Bapak Komunis Dunia, Karl Marx nyatakan agama adalah belenggu, dan Tuhan ialah penjajah. Sehingga manusia beragama tidak punya kebebasan. Oleh karena itu harus adakan Revolusi Mental yang bebaskan dan merdekakan manusia dari jajahan Tuhan.

Sejak dulu, kalangan Komunis, termasuk PKI selalu kampanyekan Revolusi Mental. Kini, justru Sang Presiden Jokowi yang teriak lantang tentang Revolusi Mental. Entah karena Jokowi tidak paham sejarah istilah Revolusi Mental, atau sebaliknya, bahkan sengaja mengkampanyekannya? Wallaahu A'lam. Yang jelas, Revolusi Mental Jokowi kini ditunggangi oleh PKI untuk hidupkan jargon PKI yang pernah popular, sehingga ini juga bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

14. KERESAHAN TOKOH -TOKOH NU TENTANG PKI

Diberitakan, KH Sholahuddin yang akrab dipanggil Gus Sholah, cucu pendiri NU; Almarhum wal Maghfur Lahu Hadrotus Syeikh Hasyim Asy'ari, nyatakan bahwa jika Jokowi minta maaf pada PKI, maka akan lukai hati dan perasaan warga NU. KH Ahmad Hasyim Muzadi; salah satu sesepuh NU dan anggota Wantimpres, juga sering nyatakan kekhawatiran Kebangkitan PKI, dan tak segan nasehati Presiden RI untuk tidak minta maaf pada PKI. Juga KH Muhammad Muhsin Thamrin; Ulama Sepuh NU di Bogor dan Pimpinan Pesantren Al Ihya juga suarakan hal yang sama, bahkan beliau selalu ingatkan santri dan umat Islam hampir di setiap tausiyahnya. Hal ini juga disuarakan oleh Ulama diberbagai kalangan, seperti; Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Al Irsyad, hingga para Habaib dari Robithoh Alawiyah. Karenanya, berbagai ormas dan tokoh Islam sepakat adakan PARADE TAUHID bersama Umat Islam pada Ahad 16 Agustus 2015 lalu, dengan Long March dari Senayan ke Bundaran HI, mulai pukul 7 pagi hingga 12 siang, salah satu tema utamanya adalah melawan kebangkitan PKI.

Segala keresahan Ulama dan Tokoh Islam ini merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI. Keresahan tersebut bukan tanpa alasan. Apalagi mereka miliki banyak lini untuk akses informasi dari Istana Presiden RI.

PRESIDEN HARAM MINTA MAAF KEPADA PKI !!!

Wacana Permohonan Maaf Presiden kepada PKI, gagal dilontarkan secara eksplisit tanggal 16 Agustus lalu, namun tidak menutup